

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021 PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI POHUWATO
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LAMONGAN
TAHUN 2020

ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)

JAKARTA

SELASA, 2 FEBRUARI 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021 PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pohuwato Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2020

PEMOHON

- Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan (Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021)
- Suhandoyo dan Astiti Suwarni (Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Pohuwato
- KPU Kabupaten Lamongan

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 14.23 – 16.17 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Arief Hidayat (Ketua)
 Manahan MP. Sitompul (Anggota)
 Saldi Isra (Anggota)

Mardian Wibowo Siska Yosephin Sirait Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

Risno Adam

B. Termohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Rinto W. Ali
- 2. Firman Ikhwan
- 3. Harianto Malik

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

Yakop Abdul Rahmat Mahmud

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Saipul A. Mbuinga
- 2. Suharsi Igirisa

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. M. Aliyas Ismail
- 2. Robinson
- 3. Dasril Affandi
- 4. Melissa Christianes
- 5. M. Fauzi Bakari
- 6. Rudi Alfonso
- 7. Stenli Nipi
- 8. Hendriyanto Mahmud
- 9. Azvant Ramzi Utama
- 10. Trisno Kamba

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Regginaldo Sultan
- 2. Nasrullah
- 3. Atang Irawan

G. Termohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Siswanto
- 2. Mahrus Ali
- 3. A. Shohib

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

Sri Sugeng Pujiatmiko

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Amir Burhanuddin
- 2. Ikhwan Fahrojih
- 3. Febri Diansyah
- 4. Ahmad Irawan
- 5. Donal Fariz
- 6. Jamil Burhanuddin
- 7. Zain Maulana Husein

J. Bawaslu:

1. Zubair S. Mooduto	(Kab. Pohuwato)
2. Rahmawaty Pahabu	(Kab. Pohuwato)
3. Ramlan	(Kab. Pohuwato)
4. Miftahul Badar	(Kab. Lamongan)
5. Amin Wahyudin	(Kab. Lamongan)
6. Toni Wijaya	(Kab. Lamongan)
7. M. Nadhim	(Kab. Lamongan)
8. Ahmad Zudi	(Kab. Lamongan)
9. Purnomo Satrio Pringgodigdo	(Prov. Jawa Timur)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai. Bismillahirahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Sebagaimana persidangan yang lalu ... yang pertama, pada persidangan kali ini kita juga mengharapkan durasi persidangan dapat dipersingkat, ya. Sehingga para ... kalau yang persidangan yang lalu, itu kita hanya mendengarkan Permohonan Pemohon, kalau hari ini kita 3 Pihak yang harus kita dengarkan, makanya harus dilakukan secara singkat, pokok-pokoknya saja, pembicaraan yang efektif, dan efisien, ya.

Baik. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Pohuwato. Silakan!

2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Yakop Abdul Rahmat Mahmud, Kuasa Hukum dari Termohon. Hari ini juga hadir bersama kami Prinsipal, Ketua KPU Kabupaten Pohuwato, Bapak Rinto W. Ali. Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Siapa namanya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Saya sendiri Yakop Abdul Rahmat Mahmud.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yakop ... oh, ini di daftar enggak ada ini. Ha?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kita Termohon, Yang Mulia.

Oh, Termohon? Oh, saya minta Pemohon tadi.

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Oh, Pemohon duluan. Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta Pemohon lihat ke sana.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, kok, yang ... anu ... yang di sini, ya, Yakop ini. Gimana? Aduh, ini ... sudah makan belum ini? Mabuk atau belum makan? Di sana sudah pegang mik mau bicara, kok sudah bicara, namanya lain, saya cari enggak ada. Ini malah belum ngomong. Baik. Kita mulai, ya. Enggak apa-apa, santai, ya. Ya, saya kira ada yang mabuk.

Baik. Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RISNO ADAM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon yang hadir di dalam sidang, saya sendiri yang bernama Risno Adam. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: REGGINALDO SULTAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Mohon izin perkenankan saya Regginaldo Sultan sebagai Kuasa Pemohon. Hadir juga secara luring, mohon izin, Yang Mulia (...)

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: REGGINALDO SULTAN

Nasrullah, S.H., dan Dr. Atang Irawan. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prinsipal itu, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: REGGINALDO SULTAN

Kuasa juga, Yang Mulia. Kuasa (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Kuasa (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: REGGINALDO SULTAN

Online ... secara daring.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik ... baik. Nah, sekarang ini baru Pak Yakop, ya. Termohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021, silakan. Itu tadi berarti Termohon Pak Yakop dan saya sama-sama mabuk itu tadi, ya.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak jelas, saya (...)

Intermezzo sedikit, Yang Mulia, tadi.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Intermezzo sedikit.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, makanya itu. Sama-sama mabuk dilarang mendahului, kan sebetulnya. Silakan!

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Siap, Yang Mulia. Ini baru benar-benar mau memperkenalkan diri, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tadi enggak, ya?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia. Izin saya sendiri Yakop, Yang Mulia ... Yakop Abdul Rahmat Mahmud, Kuasa Hukum dari Termohon. Hadir juga bersama kami Ketua KPU Pohuwato, Bapak Rinto W. Ali. Secara online juga ada Pak Firman Ikhwan dan kemudian Pak Harianto Malik di ... secara online, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

Saya kembalikan, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Termohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum Termohon, Sri Sugeng Pujiatmiko, dan hadir di ruangan ini Bapak Siswanto selaku Anggota KPU. Dan secara daring, hadir Pak Mahrus Ali selaku Ketua KPU Lamongan dan Pak Ahmad Shohib (Divisi Teknis Penyelenggaraan) juga di daring, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang hadir?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait hadir secara langsung Kuasa Hukumnya, yang pertama, M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., didampingi oleh Hendriyanto Mahmud, S.H. Dan hadir pula secara daring, pertama, Bapak Rudi Alfonso, S.H., M.H. Yang kedua, Robinson, S.H., M.H. Yang ketiga, Dasril Affandi, S.H., M.H. Yang keempat, Melissa Christianes, S.H., M.H. Yang kelima, Ir. H. M. Fauzi Bakari, S.H. Yang keenam, Azvant Ramzi Utama, S.H. Yang ketujuh, Stenli Nipi, S.H., M.H. Dan yang kedelapan, Trisno Kamba, S.H. Dan dihadiri pula oleh Prinsipal, Bapak Saipul A. Mbuinga dan Ibu Suharsi Igrisa, S.Ip., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 hadir secara luring, Febri Diansyah, S.H., dan Amir Burhanuddin. Dan para advokat lain juga hadir secara daring, Ahmad Irawan, Donal Fariz, Jamil Burhanuddin, Ikhwan Fahrojih, Zain Maulana Husein, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Bawaslu Perkara 27/PHP.BUP-XIX/2021!

42. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

44. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Zubair S. Mooduto (Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato) yang hadir bersama saya saat ini, yakni Anggota Bawaslu atas nama Ramlan. Yang kemudian yang hadir secara daring itu ada anggota Bawaslu atas nama Rahmawaty Pahabu yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Bawaslu 105/PHP.BUP-XIX/2021?

46. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu pada Perkara 105/PHP.BUP-XIX/2021 hadir secara luring, saya Miftahul Badar, bersama Bapak Amin Wahyudi. Adapun yang hadir secara daring, ada M. Nadhim, Ahmad Zudi, Toni Wijaya selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan, didampingi oleh Kordiv Hukum Provinsi ... Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Satrio Purnomo Pringgodigdo. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai dengan mendengarkan Jawaban Termohon Perkara 27/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Termohon. Pokok-pokoknya saja, ya, yang disampaikan?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia. Ini Termohon, Yang Mulia, ya?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Termohon.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Termohon, ya?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Takut salah, meminta penegasan.

Memastikan lagi, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baguslah.

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Siap, Yang Mulia. Sebelum kami bacakan jawaban, kami sudah memuat daftar renvoi kami, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebentar.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada bukti-bukti tambahan dari Para Pihak? Mulai dari Termohon, Bawaslu, atau Pihak Terkait, ada enggak bukti tambahan? Kalau ada bukti tambahan, supaya diserahkan sekarang, ya? Kalau tidak ada, ya, kita mulai. Enggak ada, ya?

Baik. Sekarang dimulai Pak Yakop, silakan!

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia. Seperti (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada Eksepsi?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada, Yang Mulia. Tapi sebelumnya itu yang renvoi kami sudah (...)

Oh, renvoinya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Renvoinya di halaman pertama.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada di halaman ... poin 1, 2, dan 3, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1, 2, 3, kenapa?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Renvoinya yang di daftar ini, Yang Mulia, yang kami serahkan juga bersamaan dengan jawaban, halaman pertama (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini toh renvoinya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Halaman 1, nama advokatnya?

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya. Kemudian, untuk halaman (...)

Sebelumnya Yakop Abdul Rahmat menjadi Yakop Abdul (...)

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Rahmat Mahmud.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang ... yang salah apanya itu? B-nya dua?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, takut kalau salah alamat (...)

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus nanti KPU kwitansinya juga salah alamat?

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, dibetulkan, ya.

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Bisa saja, Yang Mulia.

Ya, itu dibetulkan, enggak ada masalah berarti.

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kemudian (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kedua juga, di halaman 18.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Angka 12 baris ketiga, *quod non* itu kemudian kita hapus karena sudah double, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kemudian di halaman 18, angka 12, poin 2, baris ketiga, 14 ... sebelumnya 14, tulisannya *mmap*, kemudian jadi 14.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

Cukup, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya typo saja ini, ya?

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang ada Eksepsi, ya?

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya mengenai apa, Eksepsinya?

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Pertama, terkait dengan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, serta menutus (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, dianggap dibacakan.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Dianggap dibacakan.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, yang kedua?

Kedudukan Hukum (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dianggap dibacakan karena ... apa ya ... yang intinya apa? Karena tidak per ... persoalannya bukan persoalan dalil Pemohon (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak berkaitan dengan persoalan perhitungan suara (...)

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begitu, kan intinya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang, yang kedua Kedudukan Hukum.

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kedudukan Hukum (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 6 itu?

Ya, benar, Yang Mulia. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dengan alasan, satu, kemudian poin 1-nya ini, Yang Mulia, kami izin membacakan bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, khususnya mengenai angka II tentang Kedudukan Hukum, ternyata Termohon menemukan tidak kecermatan Pemohon dalam menggunakan dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan. Faktanya, ketentuan yang digunakan oleh Pemohon, yakni PMK Nomor 1/2016 juncto PMK Nomor 1/2017, padahal ketentuan a quo merupakan ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku lagi di wilayah Negara Republik Indonesia karena sudah dicabut oleh PMK 5/2017 kemudian PMK 5/2017 dicabut oleh PMK 5/2020 dan saat ini PMK 5/2020 telah dicabut oleh PMK Nomor 6/2020.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus yang intinya berkenaan dengan Legal Standing?

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Intinya sebenarnya, Yang Mulia, terkait perolehan suara, ada selisih suara ... suara Pemohon itu 27.200, kemudian peraih suara terbanyak atau dalam hal ini Pihak Terkait ada 37.190, sehingga terdapat selisih sebesar 11%.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Padahal seharusnya supaya memenuhi Pasal 158 harus berapa persen?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

2%, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2%.

Karena jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato kurang dari 250 (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ini 11%, ya?

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya. Benar, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu sebetulnya tidak ... tidak memenuhi Pasal 158.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, ya. Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan 158 (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Dan oleh karena itu harusnya dinyatakan NO, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus tenggang waktu.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kemudian terkait dengan tenggang waktu, di sini juga ternyata Pemohon menggunakan dalil yang sudah tidak berlaku lagi, Yang Mulia, yakni Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Faktanya ketentuan a quo telah diubah dengan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu (...)

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sehingga kekeliruan atas ketidakcermatan tersebut berdampak pada isi dan makna dari pasal a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini kami telah buatkan matriksnya, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu 3 hari kerja, ya, mestinya, ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan 3x24 jam.

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi faktanya Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kalau menurut dari Pihak Termohon sudah melewati, Yang Mulia.

Oh, melewati. Baik, itu Permohonan awal maupun Permohonan Perbaikan? Lewat waktu semua?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya ... ya, Permohonan awal lewat, Yang Mulia. Perbaikan tidak.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus ada lagi?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Izin, intinya itu kami mau sampaikan bahwa pada saat hasil perolehan suara pada saat itu juga Termohon mengumumkan sekaligus menyerahkan hasil penetapan perolehan suara kepada para saksi pasangan calon dan saat itu juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Serta media cetak maupun media online.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu kapan itu?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Tanggal 15 Desember 2020, kami juga buktikan dengan dokumen live streaming, kemudian bukti penyerahan, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

Jadi para saksi mandat yang hadir saat itu juga menerima dokumen pengumuman tersebut, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sehingga menurut kami Permohonan yang diajukan pada 18 Desember 2020 itu telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus yang berikutnya!

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Obscuur.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscuur. Kenapa obscuur?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Seharusnya Pemohon menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penghitungan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6 tahun 2020 yang pada pokoknya, Permohonan yang diajukan Pemohon haruslah memuat beberapa hal di antaranya uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Termohon.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, selanjutnya yang lain dianggap dibacakan.

Benar, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang dalam Pokok Permohoan.

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada di poin 5 juga, Yang Mulia. Kami ingin izin membaca di halaman 14. Bahwa dalam Petitum Permohonan a quo.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu. Ya, itu keterangan atau narasi kenapa Anda beri kesimpulan kenapa Permohonan ini obscuur, ya.

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Benar, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang dalam Pokok Permohonan.

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Dalam Pokok Permohonan bahwa Termohon secara berjenjang dari TPS, PPK sampai di tingkat kabupaten telah melaksanakan penghitungan suara di 306 TPS dan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan di 13 PPK se-Kabupaten Pohuwato dan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapannya di tingkat kabupaten dengan hasil perolehan suara tahap akhir dengan jumlah se ... jumlah suara sah=90.479 suara sah, sebagaimana keputusan Termohon Nomor 390 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

Tidak ada keberatan itu?

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan. Saya tanyakan apakah mulai dari penghitungan suara di TPS yang Anda sebutkan tadi (...)

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan kemudian 306, ya, jumlahnya, ya?

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian di 13 PPK (...)

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sama sekali (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian sampai ke tingkat kabupaten ada persoalan?

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sama sekali tidak ada keberatan, Yang Mulia.

Tidak ada. Semua tanda tangan?

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Benar, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus sekarang yang berikutnya!

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Pemohon tidak mendalilkan keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Jadi poinnya itu, Yang Mulia. Bahwa sama sekali Pemohon tidak keberatan terhadap hasil yang ditetapkan.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya ngerti, ya. Enggak usah diulangi itu sudah jelas tadi.

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus dalil berikutnya!

Kemudian dalil selanjutnya ada di halaman 17 mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat TSM.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Bahwa (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... itu kan dalilnya dia kan berkenaan dengan adanya pidana pemilu.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Adanya politik birokrasi.

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Adanya intimidasi, adanya money politics.

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul.

Itu semuanya betul? Gimana?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Izin kami bacakan, Yang Mulia. Di ... bahwa terkait dalil Pemohon tentang dugaan tindak pidana pemilu yang kemudian dikonversi menjadi pelanggaran TSM, menurut Termohon hal tersebut adalah dalil yang mengada-ngada.

Oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan dan diteruskan ke lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Pengadilan Negeri Marisa. Itu sudah diselesaikan, Yang Mulia, terkait dengan itu, Gakkumdu.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, semua sudah diselesaikan. Oke, terus!

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kemudian terkait dalil Pemohon pada halaman 7 angka 4 yang menyebutkan keterlibatan PPK Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur adalah dalil yang sangat tendensius dan mengada-ngada oleh karena istri kepala desa tersebut bukanlah anggota PPK di Kecamatan Popayato Timur. Senyatanya yang dimaksud PPK adalah ketua tim penggerak PKK. Jadi ada perbedaan antara PPK dan PKK, Yang Mulia, yang dituliskan. Kami takut bahwa tafsir PPK itu adalah penyelenggara (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sehingga kami jadikan dalil, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

Kemudian (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok yang lain, ya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Menyatakan KPPS TPS 4 Desa Motolohu terlibat politik uang adalah tidak benar karena hal tersebut telah pernah diproses di Bawaslu, kemudian hasil kajian Bawaslu perkara tersebut dihentikan.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kemudian terkait dengan dalil Pemohon halaman 8 yang menyebutkan adanya modus kesengajaan dengan melakukan pelanggaran berupa, kepala desa yang telah di pidana karena berfoto dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sambil menunjukkan empat jari adalah politik birokrasi, adanya politik uang, adanya intimi ... hal tersebut telah diselesaikan oleh mekanisme gakkumdu.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Bahwa quod non pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 21 itu benar terjadi, maka menurut hukum seharusnya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran ... dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 135 (...)

Ya, dianggap dibacakan itu. Sekarang Anda menolak bahwa dalil-dalil TSM itu tidak terbukti, ya?

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang anu (...)

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Petitum, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petitum, silakan!

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Termohon ... menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Puhuwato Nomor 390 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 15.30 WITA.

Tiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

- 1. Hamdi Alamri, S.E., Sy., dan Drs. Zairin T. D. Maksud=10.484.
- 2. H. Ibrahim Bouti, S.Pt., M.Pa., dan Hj. Miswar Yunus=15.605.
- 3. H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H., dan Zainuidi Hasan=27.200.
- 4. Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa, S.Ip., M.Si.=37.190.

Sehingga total suara sah=90.479.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Yakop Abdul Rahmat Mahmud, sudah ditandatangani. Ardi Wiranata, Rio Anwar, Moh. Saleh Gasin, Imam Rahmadani, Afif, sudah ditandatangani.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan. Yang Mulia Pak Manahan ada? Ya, silakan!

210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Kuasa Termohon, ya?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini tadi mengenai tenggang waktu di dalam jawaban ini tertulis memang pengumuman tentang hasil rekapitulasi perolehan suara itu tanggal 15 Desember 2020, pukul 15.30 WITA, ya?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi kalau ndak silap, kemarin itu ada konfirmasi secara lisan. Bahwa pengumuman itu adalah tanggal 16, itu ada kemarin itu waktu Pemohon membacakan Permohonannya.

Baik, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, mohon dijelaskan mana yang benar ini?

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Tanggal 16 itu adalah pengumu ... terkait dengan penyampaian D Hasil KWK. Jadi, yang tanggal 15 itu disampaikan, ditetapkan secara langsung di hadapan masyarakat, saksi-saksi mandat yang hadir. Kemudian, saat itu juga diserahkan rekapitulasi tersebut dan itulah disiarkan secara langsung, kami sudah buktikan juga, sehingga itulah yang dianggap pengumumannya, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang kemarin Kuasa yang hadir Saudara juga?

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Benar, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sama, ya?

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

222. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memang yang kemarin itu ada ... ada pernyataann itu, ya? Pengumuman tanggal 16.

Ya, ya.

224. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya ada catatan di sini atau bagaimana?

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Yang tanggal 16 itu penyampaian terkait dengan D Hasil, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi pengumuman yang resmi adalah tanggal 15 itu?

227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Tanggal 15 Desember 2020.

228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Pengumuman hasilnya (...)

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

15.30 WITA.

230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan mengumumkan pada pihak-pihak (...)

231. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Adalah tetap di tanggal 15?

Betul, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Demikian, terima kasih.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi, ada?

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini masih berkait dengan itu. Ini saya lagi printout pernyataan Anda ya dalam ruang sidang ini, Saudara Kuasa Termohon. Anda mengatakan klir kemarin itu, kalau saya tidak keliru bahwa hasil itu ditetapkan tanggal 15, diumumkan tanggal 16. Sekarang ini lagi di print. Sekarang di sini Anda mengatakan bahwa pengumumannya tanggal 15, jadi mana yang benar ini yang mau diikuti?

237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Tanggal 15, Yang Mulia, sebagaimana SK.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

SK-nya mana? Coba lihat! SK Nomor berapa?

239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Di T ... T-1, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

SK nomornya tolong Anda sebutkan.

241. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

SK Nomor 390 (...)

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu SK hasil?

243. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pengumumannya?

245. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Disampaikan kemudian saat itu juga diterima oleh para (...)

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Diterima dengan diumumkan itu beda, loh. Ini soalnya menyangkut orang ini, apakah dia akan lewat waktu atau tidak, Anda jangan keliru menerangkannya.

247. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, jadi waktu itu diumumkan.

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Diumumkan di hapadan para saksi dan kemudian diserahkan juga dokumen itu secara langsung, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang hadir siapa namanya Anda?

Saya Yakop, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Rinto W. Ali itu siapa?

253. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ketua KPU?

255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada, Yang Mulia, ketua KPU, Prinsipal.

256. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda coba baca Pengumuman Nomor 879 ada, enggak? Itu yang belakang Pak Rinto yang belakang? Ketua KPU?

257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada enggak Anda pegang Pengumuman Nomor 879/PL.02.06-pu/7504/Kpu-Kab/XIX/2020? Sebab catatan saya sama dengan Yang Mulia Pak Manahan itu. Karena saya yang menanya kemarin.

259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda mengatakan bahwa ini ditetapkan tanggal 15, diumumkan tanggal 16.

261. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, terkait dengan pengumuman yang nomor ... tertang ... ter-Nomor 879, ini yang dimaksud adalah sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 19 pada Pasal 31, dimana disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota wajib mengumumkan Formulir D Hasil. Jadi memang benar untuk Nomor 879 ini yang diumumkan adalah Formulir D Hasil, bukan SK penetapannya.

262. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda baca enggak itu peraturan KPU ... undang-undang? Jadi itu, pengumuman itu, baik ditaruh web maupun di papan pengumuman dan segala macam, itu yang dimaksud pengumuman. Karena begini loh, kalau Anda anggap tanggal 15, orang ini menjadi tidak memiliki, lewat tenggang waktu. Padahal Anda mengumumkannya ... ini, Anda ke depan sini! Siapa, Anda Kuasa Hukumnya.

Ini, ya, Termohon pukul 15.30 WITA, ini lalu ditanya, "Pengumuman tanggal 16?" Diperkuat oleh Ketua Panel.

"Ya." Kata Anda. Perlu diputar rekamannya, enggak?

263. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Ya, memang benar pengumuman itu.

264. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

265. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Yang dimaksud pengumuman adalah Formulir D Hasil.

266. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang ini?

267. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Ya ... bukan. Ya.

268. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini apa?

269. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Ini adalah lampirannya, Yang Mulia. Ini yang ditempel di papan pengumuman.

270. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kapan Anda tempel?

271. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Ini kalau upload di website-nya tanggal 16.

272. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, oke. Tanggal 16, ya?

273. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Ya, sesuai dengan register yang di website, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, tanggal 16?

275. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Tapi kalau di papan pengumuman, kita umumkan tanggal 15, dan kita serahkan juga untuk SK penetapan dan Berita Acaranya.

276. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Anda pada posisi 15 atau 16 mengumumkannya?

277. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Kalau pengumuman di papan itu tanggal 15, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa tanggal 15-nya? Ini di sini enggak ada tanggalnya. Mana dokumennya coba!

Anda ... Anda kemarin itu janji mau membawa semua bukti yang terkait dengan ini kan?

279. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Sudah, sudah ada, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mana coba lihat, bukti T berapa? Ini sambungan yang kemarin.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ditegaskan tanggal 15 dan diumumkan tanggal 16.

282. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini poin 180. Kan tadi Anda mengatakan, "Menetapkan tanggal 15 Desember, Pukul 15.30 WIT ... WITA."

283. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

WITA, ya.

284. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Waktu Indonesia Bagian Barat[Sic!], ya? Lalu berikutnya ditegaskan ini, Kuasa Termohon, "Ya, tanggal 16 Desember itu, Yang Mulia, kita lewat akun dari Pihak KPU, Yang Mulia." Ya kan? Karena ini penting diklirkan soal tenggang waktu, ya. Karena Anda menggunakan di

Eksepsi. Silakan kembali ke tempat! Mana bukti P berapa ... T berapa, Anda sebutkan itu? Mana T-2 ... T-3?

285. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

T-3. Berita.

286. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini, ya, flash disk-nya?

287. TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO W. ALI

Ya.

288. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti akan kami cek, ya, jadi itu apa ... soal terkait dengan Eksepsi Tenggang Waktu. Silakan kembali ke tempat!

289. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Terima kasih, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ke depan itu Anda harus yang kayak-kayak begini harus lengkap tanggal segala macam karena itu akan jadi fakta hukum kalau terjadi sengketa yang kayak sekarang, ya?

291. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Terima kasih, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya nanti kita yang menilai. Tapi pada waktu itu minta penegasan diumum ... ditetapkan tanggal 15, diumumkan tanggal 16, ya? Tapi sekarang Anda meng-Eksepsi bahwa Pemohon sudah lewat tenggang waktu karena Anda berpatokan pada tanggal 15, kan gitu, ya? Baik, sekarang Pihak Terkait? Silakan, pokok-pokoknya saja. Anda melakukan Eksepsi?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait, yang pada pokoknya sebagai berikut. Satu, mengenai Kedudukan Hukum Pihak Terkait, mohon dianggap dibacakan.

Lalu kemudian dalam Eksepsi. A. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, mohon dianggap dibacakan.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

B. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), mohon dianggap dibacakan.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya karena tidak memenuhi 158 itu, ya?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya, siap.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus? Selisihnya=9.900, ya?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padahal (...)

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Kemudian yang kedua, permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu (...)

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti sama dengan itu, ya?

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Sama yang tadi, Yang Mulia. Kemudian (...)

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena Anda berpatokan tanggal 15, ya?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Tanggal 15, betul, Yang Mulia. Kemudian yang terakhir Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel).

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, obscuur. Pokok Permohonan sekarang.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Pokok Permohonan. Pihak Terkait setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dan mendengarkan pembacaan Permohonan oleh Pemohon dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari yang lalu. Dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tiga hal pokok, yaitu yang pertama, dalil tentang politik birokrasi. Yang kedua, dalil tentang politik uang atau money politics, dan yang ketiga adalah dalil tentang intimidasi.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dengan ini menanggapinya secara singkat sebagai berikut.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur bernama Aripin Tuda bersama istri yang terlihat berfoto mengangkat tangan sambil menunjukkan empat jari bersama Calon Wakil Bupati Nomor 4, yaitu Suharsi Igirisa. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait dengan ini menanggapinya bahwa tindakan tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena yang bersangkutan bukan Tim Kampanye Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah meminta, memerintahkan, ataupun mengarahkan Kepala Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur atas nama Aripin Tuda dan istrinya melakukan kampanye atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.

Bahwa pada saat itu pula Suharsi Igirisa tidak sedang melaksanakan kampanye Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2020 dengan tidak mengenakan pakaian atau atribut kampanye, tidak membawa tim kampanye, tidak sedang melaksanakan pertemuan, tidak memberikan orasi, pidato, dan tidak melakukan ajakan, himbauan terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Selanjutnya, terkait dalil Pemohon pada halaman 8 yang mendalilkan bahwa Gubernur Gorontalo Hi. Rusli Habibi sering melakukan kunjungan serta membagi-bagikan bantuan di wilayah Kabupaten Pohuwato yang didampingi oleh Bupati Pohuwato pada saat masa kampanye berlangsung. Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas dengan alasan. Satu. Bahwa pada kegiatan pembagian bantuan oleh Gubernur Gorontalo di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Oleh karena itu merupakan program kerja pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah ada dan berlangsung di seluruh kabupaten/kota sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Bahkan, program kegiatan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan jajaran pengawas kecamatan serta desa.

Selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 9 yang menyebutkan bahwa Bupati Sarif Mbuinga telah melakukan gerakan dengan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat bersama Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, S.Pd. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolok secara tegas alasan bahwa pertemuan tersebut sifatnya hanya konsolidasi yang hanya dihadiri oleh kader Partai Golkar, dimana Bapak Sarif Mbuinga dan Bapak Nasir Giasi adalah dalam kapasitas masing-masing sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar, Provinsi Gorontalo, dan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 9 terkait ... Pihak Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan darah saudara kandung dengan Bupati Kabupaten Pohuwato yang masih menjabat sebagai bupati definitif saat ini, sehingga mengambil tindakan dengan menggunakan kewenangannya telah menggerakkan seluruh pejabat daerah yang terdiri dari wakil bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, kepala-kepala dinas, camat, kepala desa, dan seluruh aparatur sipil negara untuk ikut membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas dengan alasan bahwa. Satu, pada faktanya Bupati Pohuwato justru menginstruksikan kepada seluruh PNS di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato agar bertindak secara netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020. Bahkan Bupati Pohuwato pun membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan pelanggaran dan netralitas pegawai aparatur sipil negara pada Pemilihan Bupati Pohuwato Periode Tahun 2021-2024.

Lalu selanjutnya pada halaman 9 dalil Pemohon terkait Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Amin Haras, melakukan kampanye pada jam kerja sekitar pukul 10.00 WITA. Adapun perbuatan yang dilakukan adalah berkumpul dengan masyarakat sekitar lokasi Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, dengan mangangkat tangan dengan simbol 4 jari. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas dengan alasan bahwa karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato atas nama Amin Haras untuk melakukan kampanye tertanggal 9 Oktober 2020.

Dalil Pemohon pada halaman 9 bahwa Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, S.Pd., melakukan kampanye terbuka bertindak sebagai juru kampanye, adapun kampanye yang dilakukan Nasir Giasi, S.Pd. mengajak seluruh masyarakat yang ada di sekitar tempat kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Saudari Nasir Giasi telah mengantongi izin kampanye sebelum melakukan kampanye pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Desa Soginti, Kecamatan Dengilo.

Selanjutnya terkait dalil Pemohon pada halaman 10 yang mendalilkan bahwa pada hari Sela ... Senin, tanggal 28 September 2020, bertempat di DPD II Golkar, Kabupaten Pohuwato, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, S.Pd. melakukan penyerahan bantuan kepada instansi KUA se-Kabupaten Pohuwato sejumlah Rp10.000.000,00, dan diserahkan di Sekretariat DPD II Golkar Kabupaten Pohuwato. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas dengan alasan. Satu. bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Yang kedua bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ataupun terlibat dalam kegiatan di Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya yang terkait dengan keterlibatan ASN atas nama Muslimin Laisa (...)

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan saja (...)

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya. Kemudian, Camat Kecamatan Marisa, Muzna Giasi, dan Kepala Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, mohon dianggap dibacakan. Dan saya ingin menegaskan, Yang Mulia. Bahwa terhadap seluruh dugaan-dugaan pelanggaraan ... pelanggaran yang berkenaan dengan politik birokrasi semua sudah dilaporkan oleh Pemohon pada Bawaslu dan tidak ada satu pun di antara laporan itu yang terbukti secara sah menurut hukum (...)

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Selanjutnya dalil Pemohon terkait politik uang. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah tim relawan dari Pihak Terkait melakukan money politics di 10 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Randangan (...)

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan, itu kecamatannya. Kesimpulannya (...)

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya. Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Paguat (...)

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kesimpulannya, gimana?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Kecamatan (...)

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai politik uang?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang terkait dengan politik uang itu sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan dari keseluruhan laporan tersebut, semua dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Lalu, yang terakhir mengenai dalil Pemohon yang berkenaan dengan intimidasi.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran berupa intimidasi yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di saat saksi-saksi dari Pemohon sering mendapat ancaman dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 04 melalui kepala desa-desa sekecamatan di Kabupaten Pohuwato.

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait keberatan dengan alasan bahwa pertama, tidak benar adanya ancaman dari Tim Relawan Pihak Terkait melalui kepala-kepala desa kepada saksi-saksi Pemohon, pada faktanya Pihak Terkait tidak pernah membentuk tim relawan.

Yang kedua bahwa Pemohon bersama dengan Paslon Nomor Urut 02 yang menghadang Tim Advokasi Pihak Terkait, hal ini telah dilaporkan ke Polres Pohuwato dengan bukti laporan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTP dan seterusnya (...)

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, dianggap dibacakan.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

16. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan atas nama Arlin Abdullah tanggal 19 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak merasa keberatan atau terintimidasi dengan kedatangan pengacara atas nama Bapak Ir. H. M. Pahusihi Bakari, S.H., pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 di rumah yang bersangkutan, Bukti Pihak Terkait-17.

Petitum.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- 1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengga ... Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 ... 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 15.30 WIT tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.
- 3. Menetapkan perolehan suara tahap ... tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
 - Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon, Hamdi Alamri, S.E., S.y., dan Drs. Zairin T. D. Maksud, perolehan suara=10.484 suara.
 - Nomor Urut 2, Nama Pasangan Calon, Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt., M.P.A., dan Hj. Miswar Yunus, perolehan suara=15.605 suara.
 - Nomor Urut 3, H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H., dan Zunaidi Z. Hasan, perolehan suara=27.200
 - Nomor Urut 4, Saipul A. Mbuinga dan Suhairi ... Suharsi Igirisa, S.Ip., M.Si., perolehan suara=37.190.
 - Total suara sah sebanyak=90.479
- 4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan putusan ini dan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Bapak Rudi Alfonso, S.H., M.H., dan rekan. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup? Yang Mulia? Baik. Sekarang kita menginjak ke Bawaslu. Bawaslu tolong yang dibacakan mulai dari halaman 2 angka 3, ya? Silakan dibacakan, nanti saya anukan, yang seterusnya dianggap dibacakan. Silakan dibacakan.

331. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan Keterangan Bawaslu, yang pertama menyampaikan bahwa kami telah menyerahkan keterangan dan kemudian sekaligus dengan resume.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. He eh.

333. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Resume. Jadi, artinya ini yang akan kami bacakan ini yang resume.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Resumenya saja tidak ... tapi tidak seluruhnya.

335. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Ya. Baik, Yang Mulia.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Angka 3 itu halaman 2.

337. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Ya. Baik, Yang Mulia. Baik. Berdasarkan Pokok Permohonan, yang menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran.

Ya, itu pelanggarannya dianggap dibacakan.

339. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Baik.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

341. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan kegiatan pencegahan pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam Bukti PK-3 sampai dengan PK-9, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

343. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Yang berikut terkait dengan terjadi politik birokrasi. Pertama, bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melalui Panwas Kecamatan Randangan, Taluditi, dan Lemito telah melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur Gorontalo dalam rangka pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh virus Covid-19, Bukti PK-10.

Selanjutnya bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melalui jajaran Pengawas Desa Buhu dan Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, telah melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka kegiatan konsolidasi partai yang dihadiri langsung oleh Bapak Syarif Mbuinga sebagai Bupati Pohuwato dan sebagai Ketua Bappilu Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Bukti PK-11.

Selanjutnya bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada angka 4a. Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato terhadap terlapor Arifin Tuda, pelanggaran tersebut diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Marisa dan dinyatakan bersalah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pohuwato Nomor 84/Pidsus dan seterusnya, dan dikuatkan dengan

Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor 109/Pidsus dan seterusnya, Bukti PK-12 ... vide Bukti PK-12.

Selanjutnya bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 42, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam pada tanggal 16 Oktober 2020 dan selanjutnya di registrasi dengan Nomor Register 03/LP dan seterusnya, laporan tersebut dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi, vide Bukti PK-14.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

345. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Kemudian bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4.3, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima informasi maupun laporan atau temuan terkait dengan kegiatan dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.4, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan terlapor Muslimin Laisha pada tanggal 14 Desember 2020 dan di register dengan Nomor 13/LP dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsurunsur pelanggaran pidana pemilihan, Bukti PK-15.

Selanjutnya tekait dengan politik uang, Yang Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

347. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Risno Adam terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Paguat, Kecamatan Dengilo, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Lemito, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan Popayato, dan Kecamatan Popayato Barat kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dan diregister dengan Nomor Register 11/LP dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran berkesimpulan bahwa

laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, Bukti PK-18.

Yang berikut bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 dan tanggal 14 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Mariah Endiko, Kecamatan Paguat, Usman Daik, Kecamatan Dengilo, Alfian Hipi Kecamatan Dengilo, Inang Tahat, Kecamatan Popayato Timur. Selanjutnya diregister dengan Nomor 11/LP dan seterusnya, kemudian dengan Nomor Register 13/LP dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ke tingkat penyidikan.

Selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 hari kerja, namun pada rapat pembahasan ketiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan demi dihukum karena kedaluwarsa, vide Bukti PK-15, Bukti PK-18.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, yang terakhir!

349. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Selanjutnya terkait dengan intimidasi melalui kepala-kepala desa. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato sampai dengan jajaran pengawas tingkat desa selama melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi maupun laporan terkait dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Relawan Pasangan Calon Nomor 4 melalui kepala-kepala desa se-Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya terkait dengan TSM, Yang Mulia.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

351. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Ya.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT

353. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Selanjutnya yang terakhir TSM, Yang Mulia.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

355. BAWASLU: ZUBAIR S. MOODUTO (KAB. POHUWATO)

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Permohonan Pemohon menyatakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) juncto Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pilkada masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan, masif.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno. Zubair S. Mooduto, sudah ditandatangani. Ramlan, sudah ditandatangani. Rahmawaty Pahabu, sudah ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya menginjak ke Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021, ada Prof?

357. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ini masih terkait pengumuman penetapan tadi, ya. Jadi kami sudah periksa Bukti T-3 yang Saudara ajukan itu mulai dari live streaming, live streamingnya juga tadi kami sudah cek dan ternyata kami menemukan Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020 tingkat Kabupaten Pohuwato itu, ini kan punya Saudara, ya? Bukti dari Saudara itu tanggalnya di situ 16 Desember 2020 ini.

Jadi ada live streaming memang Anda menetapkan hasil, itu yang apa ... yang halaman-halaman di depan ini yang ... jadi ini, live streaming ini, yang fotonya Anda cek, kami sudah cek juga di Facebook itu, dan itu persis ini yang muncul, tanggalnya memang tanggal 15 Desember, tapi pengumuman penetapan hasil itu tanggal 16. Nah, ada penjelasan enggak KPU atau Kuasa Hukumnya?

358. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia.

359. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

360. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kami sedikit penjelasan terkait dengan yang di-upload itu adalah D Hasil, Yang Mulia. Sebagaimana dengan PKPU (...)

361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Yang mengatur bahwa yang di-upload itu D Hasil (...)

363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

364. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Jadi sebenarnya pengumuman itu dilakukan pada hari itu juga.

365. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Disiarkan secara langsung dan hasilnya juga sudah diserahkan kepada para pihak. Saksi-saksi (...)

367. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu di ... di penetapan KPU itu ada enggak disebut sekaligus apa ... penetapan dan pengumuman? Yang nomor ... penetapan hasil itu nomor berapa?

368. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

390, Yang Mulia.

369. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 390, ya? Ada enggak di situ dua pernyataan bergabung sekaligus? Jadi, penetapan dan pengumuman, ada enggak di situ? Coba dilihat di SK Saudara itu?

370. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Yang Mulia, pengumuman itu setelah ... maksudnya diumumkan secara langsung di sejak ... dalam rapat pleno terbuka, Yang Mulia, kan itu dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

371. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

372. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sehingga dianggap diumumkan pada saat itu juga, kemudian saat itu juga ditempel di papan pengumuman.

373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, bagaimana Anda membuktikan ke kami saat itu ditempelkan itu? Itu yang paling penting. Jadi, saya ikuti logika apa ... Saudara sekarang, ada enggak bukti yang bisa disodorkan ke kami begitu selesai Anda bacakan, ditetapkan, lalu ditempelkan itu, ada enggak? Sebab di sini enggak ada. Yang ada satu, live streaming penetapan hasil, kemudian ada bukti yang Anda ... Anda sendiri yang ngirim ini (...)

374. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

"Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten Pohuwato."

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di atas itu.

377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, di sini munculnya tanggalnya (...)

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 16.

379. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Desember 16 tahun 2020.

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, di-upload-nya itu, Yang Mulia.

381. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan upload itu. Yang pengumuman?

382. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Pengumuman itu pada saat rapat pleno yang di-upload itu D Hasil, Yang Mulia.

383. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kita berbeda ini, ya. Jadi ... apa namanya ... nanti Anda pelajari lagi peraturan KPU terkait ... di peraturan KPU itu dibelah dua.

Satu penetapan hasil, satu kotak tahapannya. Kemudian pengumuman penetapan, satu pula kotaknya, gitu. Makanya ini ... ini harus agak lebih klir dipelajari juga untuk yang lain. Dalam undang-undang itu pengumuman penetapan. Jadi pedomannya bukan penetapan karena ini ada dispute soal waktu, jadi kita harus klir. Jadi, jangan gara-gara Anda menggeser-geser begitu orang ini menjadi tidak memenuhi tenggat waktu. Makanya ini kita klirkan betul yang soal begini ini. Nah, gitu. Kecuali Anda bisa menyodorkan kepada kami Anda menempelkan pengumuman tanggal 15 setelah apa itu?

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah penetapan itu.

385. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Setelah penetapan itu. Jadi memang di ... di peraturan KPU itu ada papan pengumuman, ada webside, dan segala macam, laman KPU disebutkan. Kalau ini kan berarti laman KPU nih?

386. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

387. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini kami yang punya. Kecuali Anda bisa membuktikan peristiwa Anda menempelkan tanggal 15 itu yang Anda anggap sebagai pengumuman itu.

388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Bukti itu bisa menyusul, Yang Mulia?

389. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu saya tidak tahu kalau bukti menyusul. Pak Ketua, saya kembalikan ke Pak Ketua.

Ya. Jadi, bukti itu kan harus sebelum persidangan ini selesai, sudah harus disampaikan. Kecuali perkara Anda itu nanti berlanjut, maka itu masih dapat menambahkan alat bukti, ya.

Jadi, persidangan pilkada itu menyangkut ada persoalan formil dan persoalan materiil.

391. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Persoalan formilnya itu juga harus ditaati, diikuti dengan batasan-batasan tertentu, kemudian yang materiil juga. Nah, dua-duanya harus diikuti dan tegakkan, demi adanya kepastian hukum dan keadilan. Kalau nanti Anda sudah selesai sidang ini, kemudian baru susun ... nyampaikan bukti, kan juga repot. Bukti formil yang ada yang sekarang dimasukkan di Mahkamah itu begini, kalau bacaan Mahkamah dalam rangka penetapan dan pengumuman itu ada dua peristiwa hukum. peristiwa hukumya harus ada penetapan. Setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada harus diumuman. Diumumkannya di mana? Ini kita lihat. Jadi ada dua, sehingga bisa terjadi, ya, kebanyakan, sekaligus ditetapkan dan langsung diumumkan. Tapi karena itu dua peristiwa hukum ada yang ditetapkan hari ini, baru diumumkan besok di papan pengumuman, di website itu.

Nah, kemarin makanya pada waktu persidangan yang pertama Pemohon[Sic!] itu saya tegaskan, saya minta penegasan. Kapan Anda menetapkan? Anda sudah jawab tanggal 15, tapi kapan itu diumumkan? Anda jawab tanggal 16, sehingga Pemohon dalam Permohonan yang pertama masih memenuhi tenggang waktu. Tapi kenapa sekarang Anda mengatakan itu sudah lewat waktu, disampaikan dalam Eksespsi. Itu yang jadi masalah. Tapi itu semua kita yang menilai nanti, ya. Sekarang Anda mau mengeluarkan bukti lagi, buktinya kalau masih ada bisa sebelum sidang ini ditutup, silakan. Tapi kalau sudah sidang ini selesai dan ditutup, perkara Anda tidak berlanjut, ya, sudah selesai. Bukti yang ada yang dipakai, gitu, ya.

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Baik, Yang Mulia.

Baik, terima kasih. Ada, Yang Mulia? Cukup, ya. Yang Mulia, cukup, ya?

Baik, kita sekarang melangkah ke perkara berikutnya, Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Termohon, silakan. Ini tebal sekali apa yang disampaikan dengan beberapa lampirannya, dengan perinciannya. Saya minta disampaikan secara ringkas mulai dari Eksepsinya, silakan.

395. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait jawaban Termohon, saya langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

397. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini sama.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, dianggap dibacakan, ya?

399. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Dianggap dibacakan. Karena tidak ada dalil satu pun yang mendalilkan terkait dengan objek.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perselisihan suara, ya?

401. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

Oke, perolehan suara.

403. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang kedua. Kedudukan Hukum, berdasarkan Pasal 158 ayat, ini persentasenya 0,5%. Selisih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak itu 39.487 suara, sedangkan ambang batasnya 0,5% itu 3.951 suara, Yang Mulia, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158.

Berikutnya yang tenggang waktu, ini perspektif dari Termohon terkait dengan tenggang waktu ini soal jam, Yang Mulia, sehingga batas akhir pengajuan menurut Termohon ini hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 09.20 WIB, tetapi Pemohon mengajukan itu tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.08 WIB. Itu, Yang Mulia.

Berikutnya permoho ... Permohonan tidak jelas. Yang pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa tidak ada satu dalil pun yang terkait dengan perselisihan hasil.

Yang kedua, Petitum tidak selaras dengan Posita, Yang Mulia. Karena Pemohon mendalilkan 714 TPS, tetapi di Petitumnya mohon untuk pemungutan suara ulang di 887 TPS.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

405. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang berikutnya yang Permohonan tidak jelas bahwa ada ketidakonsistenan antar-Petitum angka 2 dengan angka 3, Yang Mulia. Karena Petitum angka 2 memohon perolehan suara ini dibatalkan di 3.071 TPS, tetapi dalam Petitum angka 3 memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang hanya sejumlah 887 TPS, Yang Mulia.

Berikutnya, Pokok Permohonan, Yang Mulia.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terkait dengan itu karena dalil Pemohon ini ada 7 dalil, maka Termohon menjelaskan satu per satu secara singkat. Yang pertama. Langsung ke halaman 20, Yang Mulia, angka 14.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

409. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terkait dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara, jumlah surat suara yang ada di TPS tidak sesuai dengan ketentuan jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2,5%. Dari itu, maka Termohon menjawab selanjutnya di halaman 23 huruf h, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

411. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidaksesuaian data penggunaan surat suara, khususnya kekurangan dan kelebihan surat suara cadangan 2,5% di TPS-TPS, pada intinya tidak mengganggu pelaksanaan pemungutan dan ... pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dapat dibuktikan sebagai berikut. Pertama, KPPS di seluruh Kabupaten Lamongan telah melayani pemilih dengan menggunakan surat suara yang diterima di TPS.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya semua yang mempunyai hak pilih tetap dapat (...)

413. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tetap dapat menggunakan hak pilih, meskipun ada kekurangan maupun kelebihan di TPS, Yang Mulia.

Ya.

415. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya, terkait dengan itu, maka Termohon akan menjelaskan di 715 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, itu telah termuat di tabel Termohon, membandingkan antara data Pemohon dengan data Termohon yang di ... dibuat tabel head to head, itu ada di halaman 32 sampai dengan halaman 56, Yang Mulia, yang dibuktikan dengan bukti T-9 sampai T-722 dan untuk membuktikan bahwa jumlah pengguna hak pilih di 714 tadi (...)

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sampai halaman 56, itu ya?

417. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya, bukti berapa tadi?

419. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bukti T-9 sampai dengan T-722, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT

T-9 sampai?

421. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Itu juga ... juga membuktikan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan itu jumlahnya sama.

Ya.

423. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sehingga tidak ada selisih, Yang Mulia.

Nah, terkait dengan itu pula, maka Termohon juga menjelaskan kenapa kekurangan surat suara atau kelebihan surat suara lebih dari lima surat suara di TPS itu, kita sudah sampaikan, Yang Mulia, di halaman ... di tabel Pemohon halaman 58 sampai dengan halaman 81, Yang Mulia. Berikut penjelasan Termohon terkait dengan kekurangan dan kelebihan surat suara dimaksud.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

425. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon, di huruf b 89 ... halaman 89, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Huruf b terkait dengan pelanggaran tata cara pembetulan atau koreksi oleh KPPS itu karena di-tip-ex dan tidak dibubuhi paraf, itu Termohon akan menjawab sebagai berikut. Bahwa kesalahan penulisan tata administrasi Formulir Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan sudah dilakukan pembetulan oleh KPPS, dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, dan pengawas TPS.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi pembetulannya bagaimana itu? Dicoret apa di-tip-ex?

Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (4) huruf b PKPU 18 Tahun 2020 itu pembetulan dengan penghapus tulisan cair, Yang Mulia.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

431. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Itu (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi harus disaksikan oleh para pihak, ya?

433. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sudah disaksikan semua.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

435. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Antara saksi pasangan calon dan pengawas TPS.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

437. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya, Yang Mulia. Di halaman 92, angka 12.

Ya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terkait dengan pembetulan koreksi 150 TPS tadi, Yang Mulia. Itu sudah dibuatkan tabel oleh Termohon yang tertuang dalam halaman 93 sampai dengan 118. Berikut penjelasan Termohon dan dibuktikan Bukti T-723 sampai dengan Bukti T-872, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

441. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa pembetulan dan perbaikan penulisan atau penjumlahan yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS, faktanya telah diselesaikan dalam rapat pleno di tingkat PPK dan pembetulan koreksi tersebut tidak mengubah hasil perolehan (...)

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak merubah angka-angka (...)

443. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sehingga masih tetap konsisten, Yang Mulia.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya yang huruf c, Yang Mulia. Halaman 118.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terkait dengan kesalahan penjumlahan, yang tertulis di Model C Hasil Salinan sejumlah 23 TPS itu ... terkait dengan itu, maka Termohon membuat tabel, Yang Mulia, di angka 4, halaman 120, disertai penjelasan Termohon, Yang Mulia, tekait dengan 23 TPS terkait dengan kesalahan penjumlahan itu di halaman 120 sampai dengan 131, dan dibuktikan dengan Bukti T-873 sampai dengan T-895, Yang Mulia.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

449. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Dan sandingkan dengan Model D Hasil Kecamatan KWK, Yang Mulia. Dan itu sudah dituangkan dalam Bukti T-900 sampai dengan Bukti T-922, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Yang itu halaman 131 itu sudah?

451. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sudah, Yang Mulia. Ini tabelnya 120 sampai 131, buktinya (...)

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penjelasannya termasuk penjelasan yang di 131 huruf di tu, ya?

453. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia. Berikut penjelasan Termohon tertuang di situ dan buktinya C-nya di T-873 sampai dengan T-9 ... T-895. Sedangkan D Hasil Kecamatannya dibuktikan di T-900 sampai dengan T-922, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

Berikutnya, Yang Mulia. Di huruf d terkait dengan kesalahan penjumlahan jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang terjadi di empat TPS, maka Termohon menyampaikan sebagai berikut.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

457. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Di halaman ... Termohon sudah membuat tabel Termohon yang termuat dalam halaman 134, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 134.

459. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikut penjelasan Termohon terkait dengan kesalahan penjumlahan itu dengan Bukti T-9 ... T-896 sampai dengan T-899, Yang Mulia.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT

99. Oke.

461. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Dan itu setelah dilakukan verifikasi fisik antara C ... C Salinan, kalau di KPU C Hasil, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak punya C Salinan dengan D Hasil Kecamatan itu tidak ada kesalahan.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang di kecamatan ... empat kecamatan itu, ya?

465. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

467. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Kedungpring sampai Sukodadi?

469. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sisanya Kalen sampai Sumberaji itu?

471. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus dilanjutkan.

Yang berikutnya huruf f, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang huruf e dianggap dibacakan itu, ya? Penjelasannya.

475. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang f?

477. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang f terkait dengan tidak boleh mencatat dalam keberatan, ini faktanya adalah setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan itu selesai dan KP ... PPK akan menyerahkan kotak suara ke KPU kabupaten, nah, ini di tengah-tengah jalan sampai dengan di kap ... di kantor KPU kabupaten itu, saksinya minta akan menulis keberatan, padahal re ... rapat plenonya sudah selesai, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di tingkat kecematan sudah selesai (...)

479. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sudah selesai.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kemudian pada waktu mau mengirim ke kabupaten, di tengah jalan dicegat (...)

Siap.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mau menulis keberatan?

483. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Inggih.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ditolak?

485. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ditolak sama K ... PPK karena sudah dimasukkan dalam kotak.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena sudah disegel kembali?

487. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, siap, Yang Mulia.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik.

489. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya. Terus yang kedua, terkait dengan rekapitulasi di Kedungpring dilakukan dua tempat itu, faktanya hanya satu kali ... satu tempat, Yang Mulia, dengan waktu yang bersamaan.

Oke.

491. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tidak ada dua ... dua tempat, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini yang angka dua itu, ya, Kedungpring itu, ya?

493. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

495. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya ... dalil berikutnya terkait dengan sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, dan seterusnya di 4 ... di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket, Termohon akan menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa meskipun terdapat do ... beberapa dokumen sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun secara fisik isi, jumlah, dan jenis perlengkapan pemilihan yang ada di kotak suara masih tetap sesuai dengan jenis dan jumlah perlengkapan pemilihan, Yang Mulia, dan kotak suara masih tetap kondisi digembok dengan kabel ties sebagai alat pengaman bahwa kondisi kotak suara dalam keadaan terkunci.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu tidak mengubah hasil perolehan suara karena itu tidak terkait dengan proses rekap karena yang direkap itu adalah Model D Hasil Kecamatan, bukan merekap sampul surat suara yang rusak dan sebagainya.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

499. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tapi memang direkap terkait dengan ... apa namanya ... perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sudah tertuang di Model D Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

501. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya yang di angka ... eh, di halaman 140 angka 16 terkait dengan laporan (...)

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu (...)

503. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Pelanggaran yang disampaikan oleh Bawaslu, maka ini kewenangan Bawaslu untuk menjelaskan itu.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terkait dengan berikutnya, Yang Mulia, halaman 141 di ... saksi Pemohon tidak menandatangani form ... Formulir D Hasil Kecamatan, terjadi di 25 kecamatan, ini memang faktanya saksi Pemohon tidak menandatangani itu dan itu merupakan hak dari saksi Pemohon karena tidak ... dengan tidak menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan, maka tidak menggugurkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Yang Mulia.

Selanjutnya (...)

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu alasannya kenapa, kok enggak mau tanda tangan itu?

507. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, banyak problemnya, antara lain tadinya sudah kita sampaikan (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sampai ke tingkat kabupaten akhirnya?

509. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Akhirnya sampai tingkat kabupaten, Yang Mulia.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

511. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tapi di C-1 semua (...)

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT

C-1-nya semua tanda tangan?

Semua tanda tangan.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di kecamatan ... ada beberapa kecamatan yang tidak tanda tangan?

515. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Betul, Yang Mulia.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai ke tingkat kabupaten?

517. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Menunya sama semua.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

519. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Jadi, di tingkat kecamatan (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menunya.

521. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

Kabupaten.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Soto Lamongan, ya.

525. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Soto gubeng ini.

527. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya, Yang Mulia, yang terakhir terkait dengan pelanggaran keterlibatan ASN itu sudah dilaporkan ke Bawaslu ada yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan ada beberapa yang dihentikan, paling tidak nanti Bawaslu akan menyampaikan secara jelas dan tegas.

Terakhir, Yang Mulia, Petitumnya. Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Yang dalam ... yang berikutnya dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.20 WIB.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabu ... Lamongan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

- Pasangan Calon Nomor Urut 01, perolehan suara=296.667 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara=336.154 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara=157.296 suara.
- Total suara sah sejumlah=790.117 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik.

529. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Horma kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, ini Pak Sri Sugeng, ya? Ya?

531. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

533. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Tanda tangannya bagus.

535. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terima kasih, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Yang Mulia Pak Manahan, ada? Silakan!

537. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada KPU atau Pihak Termohon, ini yang dipermasalahkan Pemohon ini kan sampai 887 TPS, ini apakah di dalam jawaban ini, seperti tadi memang sudah diuraikan, apakah ada laporan daripada si Pemohon ini yang membuat ... apa namanya ... laporan keberatan terhadap pelaksanaan di ... baik di TPS, ataupun di rekapitulasi tingkat PPK kecamatan, ataupun di kabupaten, begitu, ada enggak menurut KPU?

538. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Kalau menurut Termohon, waktu pas pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, itu tidak ada keberatan sama sekali.

539. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada, ya?

540. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tidak ada.

541. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah menurut KPU seluruhnya di TPS itu ditandatangani oleh saksi dari Pemohon?

542. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ditandantangani.

543. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ditanda tangan semua, ya?

544. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

545. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Prof. Saldi?

547. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ingin mendapat penegasan sekali lagi, Anda lampirkan enggak bukti semua TPS di tanda tangan oleh saksi semua pasangan calon? Ada dilampirkan di bukti enggak?

548. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ada, Yang Mulia, di Bukti T ... T-9 (...)

549. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai?

550. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sampai dengan T-922.

551. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sesuai dengan jumlah TPS, ya?

552. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

553. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

554. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Jumlah TPS-nya=3.071, Yang Mulia.

555. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi yang dipermasalahkan itu ada semuanya, ya?

Siap, Yang Mulia, sudah ada semuanya.

557. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan siap-siap terus ini, kayak tentara saja kita ini.

558. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

559. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya mau klarifikasi, ini agak serius, ya. Saudara mengatakan bahwa ini ... apa namanya ... Permohonan lewat tenggang waktu, ya?

560. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

561. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda menghitungnya bahwa ini diumumkan 17 Desember 2020, pukul 09.20 WIB, pagi, ya?

562. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

563. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pagi. Lalu Anda mengatakan karena Permohonan diajukan tanggal 21 Desember 2020 itu menjadi lewat waktu. Ini kan prinsipnya hari kerja, ya? Kalau hari kerja itu tanggal 17 Desember 2020 itu dihitung 1 hari, jadi mulai dari jam 00.00 malam sampai jam 24.00 malam, 1 hari. 18, 1 hari lagi, baru 2 hari. Sabtu, Minggu tidak dihitung.

Ya.

565. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Senin itu tanggal 21 Desember 2020 dihitung dari jam 00.00 lagi sampai jam 24.00 malamnya.

566. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Oh.

567. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, artinya ... ini supaya klir saja, ya?

568. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya.

569. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini soal sudah lewat waktu itu tidak terjadi di sini. Jadi, Anda mendalilkan hukumnya benar, perubahan-perubahan, baik dalam Undang-Undang maupun PMK-nya, bahkan mengutip putusan Mahkamah Konstitusi, tapi begitu menjustifikasi dengan peristiwa konkritnya agak sedikit kepeleset, begitu.

570. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia.

571. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya? Jadi nanti Anda jangan berasumsi. Ini harus kita klir kan ini, yang kayak-kayak begini, ya?

Ya, ya.

573. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

574. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Menjadi catatan saja, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Nanti didengarkan ... apa ya ... Pak Hasyim, ya? Yang mengawasi Anda ini, "Ini anak buah saya salah dalam penghitungan waktu ini." Katanya.

576. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, nanti yang menilai Mahkamah, silakan saja kamu bilang atau Anda bilang lewat waktu, tapi nanti Mahkamah yang menilai, ya? Kalau dia mengatakan, "Tidak ada lewat waktu," ya, kalau Anda mengatakan, "Lewat waktu," nah itu.

Tadi sudah saya jelaskan, itu ada 2 peristiwa hukum, tapi mungkin di Lamongan peristiwa hukumnya dijadikan satu, penetapan sekaligus pengumuman. Tapi kalau yang di sebelah itu ditegaskan ada 2 peristiwa waktu yang beda, ya?

Baik. Sekarang Pihak Terkait Perkara 105/PHP.BUP-XIX/2021, yang singkat, yang padat, jangan bertele-tele, Pak ... Pak KPK. Silakan!

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi, Prof. Arief Hidayat, Prof. Saldi Isra, dan Dr. Manahan Sitompul.

Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, nanti mohon izin kami akan bergantian membacakan. Yang pertama, terkait dengan ... dalam eksepsi pada prinsipnya kami menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, ini terkait dengan ketentuan Pasal 158 (...)

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Karena nilainya melebihi dari 0,5%.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Selebihnya dianggap dibacakan.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Dan yang kedua, Pemohon tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik dalam Posita ataupun dalam Petitum, padahal pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan Pasal 5 PMK ... angka 5 PMK 6/2020 seharusnya hal itu di sampaikan, baik dalam Posita ataupun Petitum.

Kemudian, Permohonan tidak jelas atau obscuur karena yang dipersoalkan di sini adalah dugaan pelanggaran administratif, sementara Pemohon sering mengulang-ulang bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat TSM, dan yang diuraikan Pemohon bukanlah terkait dengan

perselisihan suara, itu terlihat dari 7 poin yang diargumentasikan oleh Pemohon.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Kemudian, Permohonan yang disusun oleh Pemohon tidak sinkron antara Posita dengan Petitum, jadi dalam Posita diuraikan persoalan terjadi pada 892 TPS, namun permintaan PSU hanya dimintakan pada 887 TPS, kami juga tidak tahu selisihnya ke mana, tapi ini salah satu bentuk tidak kejelasan dari Permohonan yang diajukan tersebut.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Jadi, dari 4 argumentasi tersebut kami meminta Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena obscuur, ya?

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Obscuur.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Yang kedua ... yang kedua kami akan mengajukan beberapa pokok dalam Pokok Permohonan sebelum kami menyampaikan argumentasi dari Pihak Terkait atau keterangan dari Pihak Terkait, perlu diingatkan bahwa pada pokoknya Pemohon sering mendalilkan TSM, namun 6 dari 7 dalil yang diuraikan tersebut sebenarnya bersifat administratif, kalaupun ada 1 dalil terkait dengan keterlibatan ASN dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dan inzage yang kami sudah lakukan pada hari Jumat sore kemarin, Pemohon tidak memberikan bukti yang spesifik untuk mendukung dalil ke-7 ini. Sehingga sebenarnya dalam pokok permohonan pun 6 hal tersebut bersifat administratif, tapi kami akan jelaskan pokok-pokok poin pertama sampai dengan poin ke-7 itu.

Pertama terkait dengan dalil permohonan mengenai pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2018, menurut Pemohon demikian. Padahal PKPU Nomor 18 tahun 2018 tersebut tidak mengatur mengenai pendistribusian surat suara. Jadi ada kekeliruan dasar hukum yang digunakan di sana, sehingga menurut kami dalil Pemohon didasarkan pada dasar hukum yang keliru dan tidak tepat. Tentu saja kalaupun ada kekurangan-kerkurangan yang sifatnya minor, atau kelebihan surat suara, atau kekurangan surat suara, maka hal tersebut sebenarnya selain tidak pernah dipersoalkan oleh saksi pasangan calon di TPS, hal tersebut juga tidak berpengaruh pada perolehan suara, termasuk juga dalil mengenai kelebihan surat suara cadangan. Pemohon mendalilkan terdapat 714 TPS yang diduga bermasalah, yaitu perbedaan jumlah surat suara yang tersedia dengan jumlah suara yang harus ada sejumlah DPT ditambah 2,5%.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Jadi setelah kami cek dengan bukti-bukti yang ada, kejadian tersebut sebenarnya tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali ataupun dugaan pelanggaran lain yang dikategorikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon ataupun salah satu pasangan calon yang lain. Kalapun ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, kalaupun argumentasi yang didalilkan Pemohon itu benar, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dan tidak berpengaruh pada perolehan suara masin-masing pasangan calon. Sekali lagi, sifatnya adalah sifat administratif dan hal ini juga pernah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu di Bukti PT-311 yang sudah di ... hasilnya sudah ada bahwa kelebihan surat suara cadangan itu tidak mengurangi atau merugikan hak pasangan calon. Sehingga hal tersebut sepatutnya ditolak argumentasi yang diajukan oleh Pemohon.

Termasuk juga dalil Pemohon tentang ada mengatakan soal kekurangan surat suara cadangan, hal ini juga sebenarnya seluruh pemo ... seluruh pemilih yang datang di TPS, itu bisa menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada penghilangan hak konstitusional. Secara logis hal ini juga berimplikasi bahwa argumentasi yang disampaikan Pemohon ini tidak berkonsekuensi, atau tidak berdampak pada perolehan hasil suara dan tidak menghambat, atau tidak menghilangkan hak konstitusional dari Pemohon.

Kemudian terkait dengan dalil Pemohon tentang pelanggaran dan tata cara pembetulan atau koreksi oleh KPPS. Jadi di sini Pemohon mempersoalkan ada 150 TPS yang ada beberapa perbaikan menggunakan tipp-ex di sana, pada coretan Formulir Model C Salinan Hasil KWK. Padahal sebenarnya penggunaan alat untuk koreksi, atau tipp-ex ini, atau penghapus cair ini dibenarkan dan diatur dalam Pasal 19 ayat (3a) PKPU Nomor 18 tahun 2020. Jadi hal itu dimungkinkan dilakukan dan sifatnya bukanlah mengubah hasil perolehan suara, tetapi cenderung bersifat ejaan, typo, atau kekeliruan-kekeliruan mino ... minor yang memang harus diperbaiki dan itu pun disaksikan oleh para pihak.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan syarat itu tadi, disaksikan, ya?

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Betul, Yang Mulia.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kemudian tentang dalil Pemohon mengenai pelanggaran tata cara penjumlahan. Jadi Pemohon mengatakan, "Ada kesalahan tata cara penjumlahan," tetapi sebenarnya itu menurut kami pertama itu tidak bisa menjadi dasar pengajuan PSU menurut Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, dan pada prinsipnya dari bukti-bukti tersebut dapat ditemukan. Justru menurut pendapat kami, Pemohon yang salah menghitung dan menjumlahkan. Jadi Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan di sini, padahal sebenarnya yang salah hitung adalah Pemohon itu sendiri. Karena persoalan teknis penulisan hanya terjadi di 8 TPS dari 23 TPS yang didalilkan. Kami mengajukan Bukti PT-463 sampai dengan Bukti PT-485 untuk mendukung argumentasi keterangan Pihak Terkait untuk poin ini.

Kemudian tidak ada keberatan juga dari masing-masing saksi pasangan calon pada saat itu dan proses koreksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan di Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15A ayat (1) huruf h, i,

j, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga menurut kami hal ini tidak beralasan menurut hukum dan seharusnya bagian ini juga ditolak.

Kemudian dalil Pemohon tentang kesalahan penjumlahan oleh KPPS, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-486 sampai dengan PT-489. Bahwa pada prinsipnya dari bukti-bukti tersebut ditemukan bahwa Pemohon yang salah menghitung atau menjumlahkan. Jadi, tadi juga Pemohon yang menurut pendapat kami salah dalam menghitung dan menjumlahkan, dalam poin ini pun demikian. Ini poin keempat. Sehingga tidak terdapat kesalahan penjumlahan, penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan KWK tersebut. Hal ini juga menurut pendapat kami, Permohonan tidak beralasan dan seharusnya ditolak.

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon mengenai pembukaan kotak suara yang didalilkan bertentangan dengan PKPU.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Persoalan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan dan juga sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Ini kami ajukan Bukti PT-490. Sehingga sudah dilakukan penghitungan suara ulang pada saat itu di TPS 006, Desa Bojosari. Dan persoalan ini meskipun kembali dilaporkan pada Bawaslu juga sudah diterbitkan surat pemberitahuan, yang pada intinya menyatakan penanganan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti pada proses penyidikan. Sehingga poin kelima yang diargumentasikan oleh Pemohon ini sebenarnya juga sudah diselesaikan sebelumnya dan tidak beralasan, sehingga harunya ditolak di proses persidangan ini.

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran tata cara rapat pleno, selain ini juga bersifat administratif. Sebenarnya persoalan justru terjadi pada Pihak Pemohon karena saat itu permintaan saksi Pemohon dilakukan setelah sidang selesai dan ditutup. Jadi, kami pandang permintaan itu tentu saja wajar kalau kemudian ditolak dan argumentasi ini menjadi tidak berdasar dan seharusnya juga ditolak.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak relevan.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Dan terakrhir.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu karena sudah ditutup, ya, baru protes?

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Betul ... betul, Yang Mulia.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini di halaman 95, halaman 96 itu, ya?

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Ya, mulai dari halaman 94 kalau di ... anu (...)

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 94, ya (...)

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Kalau di keterangan Termohon[Sic!].

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Oke, terus?

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Terakhir sebelum poin kesimpulan. Tentang dalil Pemohon mengenai pelanggaran dugaan keterlibatan ASN. Nah, pertama kami ingin tegaskan bahwa hal tersebut tidak terjadi, jadi tidak ada keterlibatan ASN, camat, kepala desa, atau pihak lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau dibaca Permohonan yang diajukan ataupun Perbaikan Permohonan yang

diajukan, sebenarnya tidak ada argumentasi dan uraian yang cukup klir di sana tentang apa yang didalilkan oleh Pemohon ini. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan alat bukti pada hari Jumat sore sampai dengan selesai, tidak ada bukti yang spesifik untuk mendukung argumentasi Pemohon ini. Sehingga kami pandang argumentasi ini diajukan ... dalil ini diajukan tanpa bukti yang cukup, tidak beralasan, sehingga juga harus ditolak.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Berikutnya (...)

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya sekarang.

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Mas Amir Burhannudin.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: AMIR BURHANUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Febri. Sekarang Petitumnya, silakan!

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: AMIR BURHANUDDIN

Ya, sebagaimana alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Permohonan oleh Pemohon, apabila dihubungkan dengan petitum Pemohon yang menuntut untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka alasan Permohonan Pemohon tersebut tidaklah memenuhi unsur atau tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wa ... Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- A. Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- B. Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomot 1725/HK.03.1-KPT/3524/KPU-Kabupaten-XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.30 WIB.

Atau apabila Mahakamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Para Kuasa Hukum Pihak Terkait.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: AMIR BURHANUDDIN

Terima kasih.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup. Ada, Yang Mulia? Cukup. Baik, yang terakhir sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu sebelum disampaikan.

621. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Ya, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda memberikan keterangan yang tebal ini, ya?

623. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

Yang dengan kuping banyak ini, ya?

625. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Inggih, benar, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus ditandatangani oleh lima komisioner?

627. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang yang jadi masalah. Kenapa yang di resume kok tidak ditandatangani ini, lima komisioner? Ini mengikat, enggak resume ini? Di sini (...)

629. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Tidak, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

631. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Jadi, resume ini kami ambil pokok-pokok saja dari keterangan tertulis kami, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi yang mau dibacakan yang resume?

633. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Ya.

Tapi resume ini hanya ada cap dan ada paraf siapa ini?

635. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Itu paraf yang menyalin, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang menyalin?

637. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Pak Amin Wahyudin.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Anwar[Sic!] itu siapa?

639. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Anggota Bawaslu.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mana? Nomor berapa ini Pak Anwar[Sic!]?

641. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Pak Amin Wahyudin.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Amin Wahyudin, anggota ... salah satu anggota?

643. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Ya, benar, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tanda tangannya kayak spiral ini, tapi parafnya kok lain? Betul, Pak Amin ini yang buat resume-nya? Ini resume-nya dapat dipertanggungjawabkan ini? Sesuai dengan anunya ... keterangannya yang tebel ini, ya?

645. BAWASLU: AMIN WAHYUDIN (KAB. LAMONGAN)

Ya, makanya di situ ada rujuk halamannya.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu silakan disampaikan!

647. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon berkenaan, berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

649. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Sebagaimana yang kami tadi sampaikan bahwa kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

651. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Keterangan tertulis kami juga sudah kami masukan. Nah, terhadap pokok-pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan saat ini, mohon dianggap telah dibacakan.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

653. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Yang Mulia, pertama yang ingin kami terangkan ialah terkait dengan jumlah surat suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

655. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Pertama, sebagaimana Pokok Permohonan angka 4 bahwa ketidaksesuaian jumlah surat suara terjadi di 714 TPS, kami menemukan bahwa 628 TPS memang tidak sesuai, 83 TPS sesuai, 3 TPS kami tidak menemukan keberadaannya.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa ini yang dimaksud ini? Tidak sesuai itu antara ketentuan yang mestinya DPT plus 2,5% atau bagaimana?

657. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia. Jadi, 628 TPS jumlah surat suara yang diterima memang tidak sesuai dengan DPT plus 2,5%.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang sesuai hanya 83 TPS itu?

659. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang 3 itu, apa itu?

661. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Tiga ini adalah jumlah TPS yang kami tidak menemukan keberadaannya sebab menyemutkan nama desa yang secara faktual tidak menemukan keberadaannya di kecamatan yang bersangkutan.

Oke. Ini berarti kesalahan dalam Permohonan itu, ya, yang nulis ya, atau gimana ini yang dimaksud?

663. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Kami tidak menemukan. Pada pokoknya begini, Yang Mulia, bahwa 3 TPS itu kami tidak menemukan desanya di kecamatan yang didalilkan Pemohon.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Jadi dalilnya mengenai 3 TPS ini tidak jelas, ini malah ya? Ya, terus?

665. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam hal ketidaksesuaian itu pula, Bawaslu juga sudah menerima laporan. Pokoknya melaporkan bahwa jumlah surat suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%. Ini sudah kami lakukan kajian penanganan dugaan kesimpulan Bawaslu pelanggarannya dan bahwa dalam ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan DPT plus 2,5% itu bukan merupakan termasuk keadaan yang dapat dilakukan PSU. Akan tetapi, dalam hal ketidaksesuaian itu terbukti terjadi pelanggaran administrasi karena prosesnya sudah selesai, maka merekomendasikan kepada KPU. Pertama, agar meneliti dan memastikan lagi keberadaan setiap TPS yang jumlah surat suaranya tidak sesuai, serta mengumumkan hasilnya secara terbuka.

Kedua, menindaklanjuti dugaan pelanggaraan kode etiknya yang telah dilakukan oleh petugas yang melakukan penataan surat suara.

Selanjutnya, Yang Mulia, jadi pada saat hari pemungutan suara, Bawaslu sebetulnya sudah mendapatkan laporan pengawasan, yang salah satu isinya itu antara lain tentang jumlah surat suara di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%. Ada yang lebih, ada yang kurang. Berdasarkan laporan itu, saat itu Bawaslu memerintahkan kepada pengawas kelurahan, dan desa, dan pengawas TPS agar memberikan imbauan dan saran perbaikan. Pertama, jumlah surat suara yang tidak sesuai, tidak mengakibatkan pelanggaran lain.

Kedua, memastikan surat suara yang lebih, tidak disalahgunakan dan yang kurang, tidak sampai menyebabkan ada pemilih yang tidak terlayani hak pilihnya. Dan berdasarkan hasil pengawasan kami dari 3.071 TPS di Kabupaten Lamongan, tidak ada pemilih yang tidak terlayani hak pilihnya, tidak ada kurang surat suaranya.

Oke. Jadi yang kekurangan itu tidak mengurangi arti, orang yang punya hak pilih tetap dapat melakukan hak pilihnya?

667. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sedangkan yang lebih disalahgunakan, enggak?

669. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Kami tidak menemukan dan tidak mendapat laporan terkait itu.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

671. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Berikutnya, Yang Mulia, mohon izin terkait dengan beberapa kesalahan di formulir hasil sebagaimana dalil Pemohon angka 8, angka 9, dan angka 10.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

673. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Pertama, terkait dengan kesalahan cara pembetulan formulir yang didalilkan terjadi di 150 TPS.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

675. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Menurut hasil pengawasan kami, 45 TPS memang terjadi kesalahan cara pembetulan formulir.

Ya.

677. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

41 TPS terjadi pembetulan formulir, tetapi caranya sesuai ketentuan. Dalam hal ini dicoret dan diparaf.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

679. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Untuk yang 64 TPS dari 150 yang didalilkan, itu tidak terdapat pembentulan.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

681. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Adapun terkait dengan kesalahan penjumlahan di Formulir C Hasil Salinan KWK yang didalilkan terjadi di 23 TPS. Temuan kami, 7 TPS memang terjadi kesalahan, baik di C Hasil KWK, maupun C Hasil Salinan KWK. Yang 2 TPS terjadi kesalahan di C Hasil Salinan saja, untuk C Hasil KWK-nya sudah betul. Untuk yang 9 TPS, tidak terjadi kesalahan penjumlahan. Untuk yang 5 TPS, tidak terjadi kesalahan, sebab juga dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.

Adapun tentang kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih di 4 TPS yang didalilkan Pemohon pada angka 10. Menurut temuan kami, 2 TPS kesalahannya itu memang di C Hasil KWK sama di C Hasil Salinan KWK. Adapun untuk 2 TPS, salahnya itu hanya ada di C Hasil Salinan saja, C Hasil KWK-nya sudah betul.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

683. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Kesalahan-kesalahan penjumlahan berdasarkan hasil pengawasan kami, telah dilakukan pembetulannya di pleno kecamatan.

Oke. Sudah selesai berarti.

685. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua, sedikit?

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

687. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Bawaslu itu yang pertama, ya, di halaman 2 di atas itu yang 105 TPS itu, 150 TPS.

688. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Ya.

689. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

45 TPS kesalahan cara pembetulan formulir, 41 TPS pembetulan fomulir, caranya sesuai dengan ketentuan. 64 tidak terdapat pembetulan.

690. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

691. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari hasil pengawasan Bawaslu, ada enggak perubahan suara pasangan calon?

692. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Tidak ada, Yang Mulia.

693. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Oke. Sekarang sampai yang tadi, ya, berdasarkan hasil pengawasan kesalahan-kesalahan penjumlahan itu telah dibetulkan di tingkat rekapitulasi di kecamatan.

695. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Teruskan!

697. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Selanjutnya terkait dengan pembukaan kotak suara di TPS 6 Bojoasri, Kalitengah, Yang Mulia, sebagaimana dalil Pemohon angka 11. Jadi Bawaslu telah meregister kejadian itu sebagai temuan dugaan pelanggaran, berdasarkan kajian Bawaslu pada kejadian itu telah terjadi pelanggaran administrasi, sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 60 ayat (6) PKPU 8 Tahun 2018. Terhadap rekomendasi itu, KPU telah menindaklanjutinya, tapi tidak dalam bentuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) akan tetapi dengan melakukan hitung ulang di pleno kecamatan.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti begini, saya minta penegasan. Pada waktu di tingkat kecamatan itu dilakukan dihitung ulang, ya?

699. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi yang dihitung ulang itu kertas suaranya?

701. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Surat suaranya, Yang Mulia.

Ya, kertas suara atau surat suaranya itu, ya?

703. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak hasil rekapitulasi di TPS, tapi dihitung satu-satu kembali?

705. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

707. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Dihitung ulang. Di kecamatan.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, terus?

709. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa laporan ke Bawaslu dalam hal KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk PSU di TPS 6 Bojoasri. Laporan ini sudah kami register dan karena merupakan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, penanganannya di Gakkumdu. Pada pembahasan di Gakkumdu disimpulkan bahwa unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti di tingkat penyidikan.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

711. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Adapun terkait dengan laporan ke Bawaslu dalam hal Ketua PPK Kedungpring yang tidak bersedia tanda tangan formulir keberatan saksi, sebagaimana Permohonan angka 12. Bawaslu sudah melakukan penanganannya dan kesimpulannya bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

713. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Terkait dengan pelaksanaan pleno kecamatan yang didalilkan dilaksanakan di tempat yang berbeda. Berdasarkan hasil temuan kami, Yang Mulia. Memang ada tiga kecamatan yang melaksanakan pleno kecamatan secara pararel dua kelompok, yakni Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, dan Kecamatan Duri. Adapun 24 kecamatan yang lain di Kabupaten Lamongan, pleno kecamatannya dilaksanakan satu kelompok.

Terkait dengan penataan perlengkapan hasil rekap (...)

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini yang dilakukan secara (...)

715. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Pararel, Yang Mulia.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pararel itu bermasalah enggak?

717. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan supaya mempercepat proses dilakukan anu, ya (...)

719. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Inggih. Pararel.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Misalnya ada 14 kotak, 7 di sini, 7 di sini. Habis itu disatukan, kan?

721. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Ya, benar, Yang Mulia.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

723. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Selanjutnya terkait dengan penataan perlengkapan hasil rekap kecamatan, Yang Mulia. Jadi, memang kami menemukan penataan kelengkapan rekap kecamatan yang tidak sesuai ketentuan di 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Deket, Kecamatan Gelagah, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sulokpuro, Kecamatan Sarirejo, dan Kecamatan Duri. Ini sudah kami jadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran dan sudah kami rekomendasikan juga kepada KPU Kabupaten Lamongan untuk ditindaklanjuti dalam hal dugaan pelanggaran etiknya.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

725. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Terakhir, dalam hal dalil yang menyebutkan keterlibatan ASN, camat, kepala desa mendukung pasangan calon nomor urut tertentu. Berdasarkan hasil pengawasan kami, Yang Mulia. Bahwa kami telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran. Ada laporan sebanyak 5 perkara. 2 di antaranya kami register, 3 tanpa kami register. Temuan ada 2 perkara, informasi awal ada 5 perkara. Kesemuanya berjumlah 12 perkara. Nah, tindak lanjut atau hasilnya, 6 perkara telah kami teruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk 1 perkara berhenti ... dilipahkan ke Gakkumdu. Sementara untuk yang 5 perkara kami sudah lakukan investigasi, tapi tidak ditemukan dugaan pelanggarannya,

sehingga tidak dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Lamongan ada, Prof? Cukup? Yang Mulia ada? Cukup.

Baik, kalau begitu sudah selesai kita mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, baik dalam Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 maupun dalam Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021. Sekarang sampai pada pengesahan bukti.

Pada Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 ada yang belum disahkan dari Pemohon ... bukti tambahan baru bisa disahkan sekarang karena memerlukan waktu verifikasi ... ada bukti tambahan Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-49. Betul? Ya.

Kemudian, Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8. Kemudian, Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17.

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALIYAS ISMAIL

Ya, betul, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-18. Betul, ya? Betul.

Ini untuk Pemohon bukti tambahannya Bukti PK[Sic!]-49 belum dileges, nanti diselesaikan, ya. Belum dileges. Ha? P-49. Ini masih catatannya mana? Oke, nanti di ... anu ... ya, dicek, ya. Baik.

Kemudian, Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Lamongan, Pemohon tidak mengajukan tambahan dan semuanya sudah beres. Berarti Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-924?

729. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Benar, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. PT ... sekarang Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-493.

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: FEBRI DIANSYAH

Benar, Yang Mulia.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, Pak Febri? Betul, ya. Baik. Sekarang Bawaslu Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-16.

733. BAWASLU: MIFTAHUL BADAR (KAB. LAMONGAN)

Benar, Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Semuanya disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Pada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, perlu saya sampaikan sebagai akhir persidangan ini, perkara yang sudah selesai dalam pemeriksaan awal, baik persidangan yang pertama maupun kedua ini akan dilaporkan Majelis Panel kepada Rapat Putusan Hakim untuk diambil kesimpulan, ya. Apakah perkara ini dilakukan pemeriksaan lanjutan atau cukup diselesaikan setelah pemeriksaan yang sudah dilakukan ini, ya. Nanti sewak ... semuanya ... dua-duanya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kelanjutan dari persidangan ini, ya.

Ada yang akan disampaikan? Dari Pemohon cukup? Dari Termohon apa?

735. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ingin menyampaikan ada renvoi.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Aduh, sudah mau selesai renvoi. Renvoi di mana itu? Tolong dicatat dalam risalah.

737. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Cuma penjumlahan saja.

Penjumlahannya kenapa?

739. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Di pasa ... di halaman 128 itu (...)

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT

128.

741. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, di halaman itu tertulis jumlah seluruhnya antara laki-laki dan perempuan itu tertulis 282.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

743. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sebenarnya yang betul 382.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul 382?

745. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, itu saja, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tertulisnya 282?

747. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

Oke. Yang betul 382.

749. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik. Sudah disampaikan. Ada lagi? Pihak Terkait, cukup? Cukup. Baik. Kalau begitu Bawaslu, cukup? Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.17 WIB

Jakarta, 2 Februari 2021 Panitera, **Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

